Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

**Fikriya Aniq Fitri¹, Nisaul Muftia², Irda Trilia³,
Abdurrahman Hidayah Munthe⁴, Ramlan⁵**

^{1,2,3,4,5}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh
Email: fikriyaaniqafitri@gmail.com¹, nisaulmuftiaa@gmail.com²,
irdatrilia276@gmail.com³, rahmantran@gmail.com⁴, papizola61@gamil.com⁵

ABSTRAK

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Di Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang pemidanaan secara retroaktif dan menuntut adanya kepastian hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami penerapan asas legalitas dalam menghadapi perkembangan hukum pidana di era modern, khususnya dengan munculnya kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep teoritis asas legalitas serta tantangan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan menganalisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan pandangan para ahli hukum mengenai asas legalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat untuk menindak pelaku kejahatan berat. Kesimpulannya, diperlukan reformasi hukum pidana yang adaptif namun tetap menjaga prinsip-prinsip asas legalitas agar relevan dengan dinamika sosial dan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Tinjauan Teoritis, Asas Legalitas, Hukum Pidana

Pendahuluan

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia lahir dari kerangka sosiologis yang mengagungkan asas melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang pihak yang berwenang. Sebelum dimulainya Abad Pencerahan pada tahun kekuasaan dapat menghukum orang tanpa batasan apa pun. Pada waktu itu, hak terbesar untuk memutuskan apakah suatu perbuatan akan dihukum atau tidak adalah keinginan akan kekuasaan. Untuk mengatasi hal ini, terdapat asas legalitas yang merupakan sarana penting dalam mempertahankan kebebasan individu terhadap negara (Sudiby & Rahman, 2021).

Dalam hukum positifnya, negara Indonesia mengakui asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau perbuatan harus dilakukan dengan undang-undang. Peraturan ini pertama kali diadopsi dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan yang dimaksud Asas legalitas dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa versi maksimal Misalnya *nullum delictum nulla poena sine praevea Lege poenali* (Tidak ada pidana, tidak ada hukum pidana sebelum hukum pidana). Suatu perbuatan tidak dapat diakui sebagai tindak pidana, kecuali perbuatan itu digolongkan dalam demikian.

Aturan tentang kekuatan hukum pidana terhadap waktu itu merupakan aturan yang sangat mendasar. Aturan ini dianggap mendasar karena berlaku tindaknya norma hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan pada suatu waktu tertentu (Efendi et al., 2024). Oleh karena itu wajar jika hukum pidana negara menjadi yang pertama menyebutkan asas ini dalam ketentuan pidananya.

Hukum pidana Islam juga bertumpu pada asas legalitas berdasarkan al-Quran, yaitu surat al-Baqarah pasal 286, surat al-An'am pasal 19, surat al-Isra pasal 15, dan surat al-Kashash pasal 59. Dengan kata lain, tidak ada hukum yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu kecuali ada peraturan hukum yang memuat perintah atau larangan (Djazuli, 2000). Hukum pidana Islam dapat dijadikan rujukan alternatif untuk memperbaiki asas-asas legalitas di Indonesia (Hasan, 2014). Untuk membuktikan secara utuh keberadaan asas legalitas yang berlaku, perlu dilakukan penelusuran mendalam dan mengungkap hukum-hukum yang ada dalam masyarakat pada tahun (Adinda et al. , 2024). Untuk mencapai keadilan hukum yang sejati, diharapkan terdapat berbagai asas hukum yang mencerminkan unsur-unsur hukum yang ada dalam masyarakat (MZ et al., 2023).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode yang mengandalkan kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik asas legalitas

dalam hukum pidana Indonesia. Sumber-sumber yang ditelaah meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan asas legalitas. Selain itu, penulis juga memanfaatkan sumber-sumber primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sumber sekunder berupa literatur hukum yang mengupas lebih dalam mengenai asas legalitas, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Dalam proses pengumpulan data, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, di mana penulis mendeskripsikan konsep-konsep yang berkaitan dengan asas legalitas, kemudian menganalisis berbagai teori dan pandangan dari para ahli hukum mengenai penerapan asas tersebut di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap substansi asas legalitas dan relevansinya dalam perkembangan hukum pidana modern. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan tinjauan teoritis yang komprehensif terkait asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Asas Legalitas

Asas legalitas, atau yang dikenal dengan istilah “*nullum crimen, nulla poena sine lege*,” merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (Yasanegara, 2016). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan kepastian hukum.

Asas legalitas di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku (Yanto & Hikmah, 2023). Prinsip ini diadopsi dari tradisi hukum Eropa, khususnya dari hukum Jerman dan Belanda. Dalam konteks sejarah, asas ini muncul sebagai respons terhadap praktik hukum yang tidak adil dan sewenang-wenang yang terjadi di masa

lalu, di mana individu dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas (Prasetyo, 2010).

Asas legalitas sangat penting dalam sistem hukum pidana karena memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang (Situngkir, 2018). Hal ini menciptakan rasa aman dan keadilan, serta mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum yang ada. Dengan adanya asas ini, individu dapat mengetahui dengan jelas apa yang dianggap sebagai kejahatan dan hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Dalam praktik penegakan hukum, asas legalitas mengharuskan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Asas legalitas juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya asas ini, individu memiliki hak untuk mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta hak untuk tidak dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang.

Meskipun asas legalitas sangat penting, penerapannya di lapangan seringkali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya undang-undang yang tidak jelas atau ambigu, yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga memunculkan kebutuhan untuk memperbarui undang-undang agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat.

Secara keseluruhan, asas legalitas merupakan pilar penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan menjamin bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa undang-undang, asas ini melindungi individu dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan

keadilan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, penting bagi semua pihak untuk terus berupaya menjaga dan memperkuat asas legalitas demi terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan.

B. Kedudukan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas legalitas, atau dalam istilah Latin disebut “*nullum crimen, nulla poena sine lege*,” berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum bagi setiap individu. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia juga menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus jelas dan tegas diatur dalam perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memahami batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya ketentuan yang jelas, individu dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam bertindak, serta menghindari risiko terkena sanksi pidana atas tindakan yang tidak mereka ketahui sebagai pelanggaran hukum (Firmansyah et al., 2024).

Selain itu, asas legalitas berperan penting dalam menjaga keadilan sosial. Dengan menerapkan asas ini, masyarakat dapat merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan kriminal harus berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak ada individu yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini juga mendorong perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami undang-undang yang mengatur perilaku mereka.

Asas legalitas juga memiliki implikasi terhadap penerapan hukum yang bersifat retroaktif. Dalam hukum pidana, penerapan hukum secara surut atau retroaktif dilarang, artinya undang-undang yang baru tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut ditetapkan. Ini merupakan langkah untuk melindungi individu dari kemungkinan hukuman yang tidak adil dan tidak terduga. Prinsip ini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hukum, sehingga masyarakat tidak merasa cemas atau khawatir akan perubahan hukum yang tiba-tiba yang dapat merugikan mereka (Putri et al., 2024).

Dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas juga memiliki kedudukan yang penting. Hukum pidana Islam menekankan kejelasan dan kepastian hukum, di mana setiap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran harus diatur secara eksplisit dalam sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, asas legalitas sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Penerapan asas ini dalam konteks hukum pidana Islam juga membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi akibat penerapan hukum yang tidak transparan.

Kedudukan asas legalitas juga berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya asas ini, para pembuat undang-undang dituntut untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan ketentuan pidana. Mereka harus memastikan bahwa setiap pasal yang ditetapkan tidak hanya jelas dan tegas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para legislator untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan. Asas ini menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi dan diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur. Dengan demikian, asas

legalitas memainkan peran yang sangat penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulannya, asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan mencegah tindakan pemidanaan yang sewenang-wenang. Meskipun prinsip ini telah tertanam kuat dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP, penerapannya di era modern menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perkembangan teknologi, munculnya kejahatan baru, serta tuntutan untuk menindak kejahatan berat. Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip asas legalitas, sehingga hukum pidana tetap relevan dan adil dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*. Grafindo Persada.
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
- Hasan, H. (2014). *Hukum Pidana Islam 1*. Alauddin University Press.
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.47>

- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22–42.
- Sudiby, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>
- Yasanegara, I. G. (2016). Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.13.1.384.%25p>